

HUBUNGAN TINGKAT PENCURIAN DENGAN KUALITAS PERMUKIMAN KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Ade Putri Permatasari
adeputripermatasari@gmail.com

Djaka Marwasta
marwasta_d@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) identify the level of theft and burglary hot spots in Depok, (2) identify the level of quality of the settlement in Depok, (3) study the relationship between the level of settlements with the quality of the settlement in Depok. The method used was survey the field, scoring variables and descriptive analysis. The relationship between the level of theft with the quality of the settlement using correlation test. The data used primary data and secondary data. Total sample is 100 respondents house that was experienced theft.

The results showed that (1) the rate of theft in Depok by 36 settlements that are wary that the theft rate is moderate. (2) the level of quality of the housing in Depok by 58 settlements have the quality of being that is not of high quality and low. (3) there is a sufficient connection between the quality of the settlement with the theft rate is inversely proportional, if the quality of the settlement was high, the level of theft is low.

Keywords: theft rates, quality of the housing, correlation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi tingkat pencurian dan sebaran titik kasus pencurian di Kecamatan Depok, (2) mengidentifikasi tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Depok, (3) mengkaji hubungan antara tingkat permukiman dengan kualitas permukiman di Kecamatan Depok. Metode yang digunakan adalah survey lapangan, skoring variabel dan analisis deskriptif. Hubungan keterkaitan antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman menggunakan metode uji korelasi. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Jumlah sampel sebanyak 100 responden kepala keluarga yang mengalami pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat pencurian di Kecamatan Depok sebesar 36 permukiman yaitu bersifat waspada yaitu tingkat pencurian yang sedang. (2) tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Depok sebesar 58 permukiman memiliki kualitas yang sedang yaitu tidak berkualitas tinggi dan rendah. (3) adanya keterkaitan yang cukup antara kualitas permukiman dengan tingkat pencurian yang berbanding terbalik, yaitu jika kualitas permukiman tinggi maka tingkat pencurian rendah.

Kata kunci: tingkat pencurian, kualitas permukiman, uji korelasi.

PENDAHULUAN

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun di perdesaan (Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman). Permukiman menurut Yunus (1989) permukiman tersebut di definisikan sebagai suatu tempat tinggal hunian ataupun bangunan untuk tempat tinggal serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kualitas permukiman ini dapat diukur dengan berbagai indikator, di antaranya yaitu kualitas atap bangunan, kualitas bangunan, kualitas sarana prasarana, kualitas jalan dan kualitas lingkungan itu sendiri.

Kajian adanya hubungan antara kualitas permukiman dengan kasus tindak kejahatan pencurian ini dilakukan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini karena tingkat kasus pencurian tertinggi berada pada Kabupaten Sleman dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan, berbeda dengan kabupaten lainnya yang semakin tahun mengalami penurunan tindak kejahatan pencurian. Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sleman.

Adapun masalah-masalah masyarakat dan pemerintahan yang menghambat bagi peningkatan kualitas permukiman yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan ekonomi penduduk untuk dapat membangun dan membeli permukiman yang layak dan berkualitas. Kaitannya dengan kemampuan ekonomi yang rendah sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Kualitas permukiman yang buruk dengan tingkat keamanan yang rendah maka akan menimbulkan semakin tingginya tingkat kasus pencurian.

Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan semakin sempitnya lahan permukiman sehingga terciptanya permukiman dengan kualitas yang rendah di daerah perkotaan, banyaknya permukiman yang

ada di kampung-kampung dengan sarana prasarana lingkungan yang buruk berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang rendah. Saluran pembangunan limbah sampah yang tidak tersedia serta fasilitas sosial lainnya yang rendah dan adanya perkampungan yang tidak tertata dengan baik yaitu kondisi fisik, sosial, ekonomi dan kesehatan yang tidak memenuhi standar (Kurniasih, 2007).

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi tingkat kasus pencurian di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi kualitas permukiman di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
3. Mengkaji hubungan antara tingkat kasus pencurian dengan kualitas permukiman di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Permukiman menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataupun kawasan perdesaan. Permukiman merupakan tempat bermukim bagi manusia yang sudah disiapkan secara matang dan mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan dan menciptakan suatu kenyamanan kepada para penghuninya (Parwata, 2004). Menurut Van der Zee 1986, permukiman (*settlement*) adalah suatu proses mencapai dan menetap pada suatu daerah. Permukiman selain untuk tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja namun juga memberikan fungsi untuk menyediakan fasilitas pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi.

Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*. Permukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya,

pada hakikatnya saling melengkapi (Kurniasih,2007).

Permukiman terdiri dari: (1) isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat; dan (2) wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia. Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya 6 dapat dibagi ke dalam lima elemen yaitu:

1. Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan iklim;
2. Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara dan temperatur), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral;
3. Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi;
4. Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, dan rumah sakit), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi; dan
5. Jaringan (*network*) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik (Parwata,2004).

Keman (2005: 32) mengungkapkan kualitas permukiman yang baik haruslah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan didukung oleh perilaku penghuninya. Satuan lingkungan pemukiman adalah kawasan permukiman dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun dalam perkembangannya, terdapat sejumlah masalah permukiman yang saat ini timbul diantaranya kepadatan bangunan, tidak mencukupinya jaringan air bersih, dan pembuangan air kotor yang tidak termanajemen dengan baik.

The committe on the hygiene of housing of the american public health association 1954 dalam Yunus, 1987 menentukan syarat rumah

sehat adalah rumah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis, suhu optimal yang ada dalam rumah, keadaan ventilasi yang baik dan adanya ruangan
2. Kebutuhan psikologis, dapat memenuhi kebutuhan individu, kebebasan dan kesempatan dalam keluarga.
3. Memberikan perlindungan terhadap penyakit yang menular dan dapat mencegah adanya penularan, adanya air bersih, tersedianya tempat pembuangan air kotor.
4. Memberikan perlindungan dan pencegahan apabila terjadi kecelakaan dalam rumah baik itu dilihat pada keadaan konstruksi bangunan yang kuat, sehingga diharapkan dapat menghindari dari beberapa kecelakaan, diantaranya roboh.

Menurut Direktorat Jendral Penataan Ruang DPU, kualitas lingkungan merupakan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu lingkungan. Sedangkan pengertian kualitas permukiman merupakan “kondisi permukiman yang diukur berdasarkan standar tertentu, yakni standar kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, kualitas kepadatan lalu lintas kendaraan, mengandung ukuran keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, mengandung ukuran tingkat pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup” (Kamus Penataan Ruang, 2009). Persyaratan aspek kualitas lingkungan permukiman mencakup persyaratan fisik rumah itu sendiri sebagai tempat tinggal dan juga persyaratan fisik sarana dan prasarana penunjang aktivitas bermukim yang ditinjau dari segi kuantitas, kualitas dan juga jangkauan pelayanannya.

Peningkatan kualitas permukiman dapat berupa kegiatan-kegiatan, perbaikan atau pemugaran, peremajaan dan pengelolaan/pemeliharaan yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial

ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana, penyakit dan keamanan (Dirjen Cipta Karya, 1999).

Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan tidak mempunya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya seperti prasarana jalan, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan sebagainya (Budiharjo, 1991: 62). Hal tersebut dikarenakan perkembangan lahan terbangun yang meningkat memberi implikasi meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjangnya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan berpotensi memunculkan berbagai masalah seperti kemacetan, banjir, dan tumbuhnya *slum area* serta berbagai masalah lingkungan lainnya.

Permasalahan masyarakat dan pemerintah yang dapat menghambat bagi peningkatan kualitas permukiman disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya kemampuan ekonomi penduduk untuk membeli atau membangun rumah sehingga untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat memperoleh dan menikmati permukiman yang layak.
2. Pertambahan penduduk yang meningkat baik yang berasal dari pertambahan penduduk secara alami maupun dari perpindahan penduduk ke daerah perkotaan.
3. Perkampungan yang tidak tertata dengan baik dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak memenuhi standar.
4. Terdapatnya kampung-kampung dengan prasarana lingkungan yang buruk, tidak ada air bersih, saluran-saluran pembuangan sampah yang tidak terkendali, dan fasilitas sosial lainnya. (Kurniasih : 2007)

Secara umum cara untuk menilai kualitas lingkungan permukiman yaitu dapat dengan secara terestrial. Penilaian secara terestrial yaitu dilakukan dengan melakukan survei langsung dilapangan untuk memperoleh informasi, apa saja yang ingin diperoleh terkait dengan kualits permukiman tersebut. penilaian secara teretriial tersebut juga dapat melihat dan menilai langsung keadaan kondisi fisik bangunan dan kondisi

lingkungan permukiman tersebut serta sarana prasarana yang ada sehingga dapat menentukan suatu tingkat kualitas permukiman disuatu wilayah. Penentuan kualitas permukiman dalam penelitian ini mengacu pada penelitian menurut Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (1980).

Indonesia merupakan negara hukum yang perlu dipatuhi semua aturan-aturan yang telah tertera dalam undang-undang. Pengerian pencurian menurut hukum berserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“ Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak RP. 900,000” . (Longman, 1998)

Ditinjau dari segi yuridis maka tindak kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang maka Undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa berpidana. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum (Anwar, 1986)

Menurut Soesilo (1984) pencurian adalah suatu kejahatan yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP yang hampir sama dengan penggelapan. Perbedaanannya adalah jika pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada dalam tangan pencuri dan harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu memiliki barang itu sudah berada pada tangan pelaku tidak dengan jalan kejahtan. Tindak pidana pencurian jika dilihat dari KUHP diatur dalam Pasal 362-367 KUHP dengan 5 macam kasus pencurian, yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode kuantitatif. Metode kuantitatif tersebut adalah lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomenal sosial. Analisisnya menggunakan analisis deskriptif dengan menjabarkan hasil dari pengukuran yang telah diperoleh tersebut.

1. Perolehan data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari survey lapangan langsung ke wilayah kajian penelitian. Data primer tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi lapangan serta pengambilan data langsung pada kepala keluarga yang dijadikan sampel dengan menggunakan kuesioner.
- b. Melakukan wawancara dengan kuesioner yang telah disiapkan. Metode untuk menentukan jumlah sampel yaitu dengan teknik *quota sampling* dimana nebebtukan jumlah sampel dari suatu populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan dapat tercapai. (Wijayanto,2014). Ciri-ciri tertentu tersebut yaitu meniliti tentang tingkat pencurian dengan kualitas permukiman di Kecamatan Depok. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 46 responden di Desa Caturtunggal, 27 responden di Desa Maguwoharjo dan 27 responden di Desa Condongcatur. Teknik *quota sampling* tersebut diharapkan dapat mewakili untuk perolehan informasi tingkat pencurian dan tingkat kualitas permukiman yang nantinya akan dikaitkan antara kedua variabel tersebut.

2. Perolehan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mendatangi langsung instansi yang berkaitan dengan data sekunder yang kita butuhkan. Data sekunder yang diinginkan bisa langsung diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang ada di badan pusat statistik Kecamatan Depok berupa jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan juga kondisi wilayah Kecamatan Depok. data sekunder lain yaitu berupa laporan kecurian dari kepolisian dan juga data sekunder peta administrasi Kecamatan Depok diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.

3. Pengolahan data dan analisis data

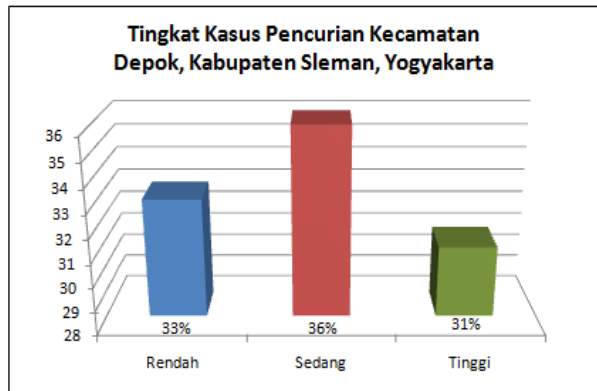
Survey lapangan yang telah dilakukan dengan mewawancarai 100 responden di Kecamatan Depok kemudian dioalh dan diinput menggunakan software SPSS dengan pemberian pengharkatan dan diskoring tergantung pada besarnya pengaruh variabel tersebut. Analisis yang digunakan yaitu dengan analisis kuantitatif menyajikan data-data yang telah diolah berupa data-data hasil skoring dan pembobotan untuk mengetahui tingkat pencurian dan tingkat kualitas permukiman Kecamatan Depok. Hasil korelasi kendall's tau-c juga digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi antara tingkat pencurian dengan tingkat kualitas permukiman kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kasus Pencurian Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Penelitian ini meneliti tentang tingkat kasus pencurian khususnya yang ada di Kecamatan Depok dengan beberapa variabel yang diukur sehingga dapat menghasilkan tingkat kasus pencurian. Variavel-variabel tersebut yaitu mulai dari kerugian yang dialami, pencurian yang dilakukan dengan cara, ketersediaan pos ronda, ketersediaan hansip, jarak keberadaan pos ronda, petugas penjagaan pos ronda, jam operasional pos ronda, jam dimulainya kegiatan pos ronda, sistem kegiatan pos ronda, luas jangkauan pos ronda, ketersediaan *cctv*, ketersediaan portal, ketersediaan lampu, ketersediaan polisi berpatroli, jumlah waktu polisi berpatroli dan jumlah polisi yang berpatroli. Variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk menghasilkan nilai tingkat pencurian. Tingkat pencurianpun dibagi kedalam 3 kelas yaitu kelas pencurian rendah, kelas pencurian sedang, dan juga kelas pencurian tinggi.

Variabel-variabel tingkat pencurian tersebut diklasifikasikan dan diberi nilai skoring pada masing-masing atribut. Pemberian skoring tersebut diberikan tergantung pada besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat kasus pencurian. Semakin tinggi pengaruhnya terhadap tingkat kasus pencurian maka akan semakin tinggi pula bobot skoring yang diberikan. Masing-masing variabel memiliki nilai skoring yag berbeda-beda.



Sumber : Data Primer atau survey (diolah)

Gambar 4.1. Tingkat Kasus Pencurian Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Berdasarkan gambar 4.1 yaitu tingkat kasus pencurian di Kecamatan Depok maka dapat diketahui bahwa sebanyak 33 permukiman memiliki tingkat pencurian yang rendah atau aman, 36 permukiman memiliki tingkat pencurian yang sedang atau waspada, dan sebanyak 31 permukiman memiliki tingkat pencurian yang tinggi atau rawan. Kecamatan Depok ternyata jika dilihat dari tingkat pencuriannya tertinggi sebanyak 36 permukiman memiliki status wilayah yang waspada akan kasus pencurian. Nilai tersebut didapatkan dari pembobotan skoring masing-masing variabel yang mempengaruhi tingkat pencurian.

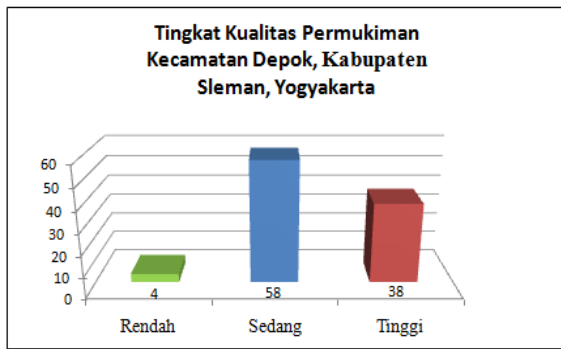
Nilai yang tinggi pada tingkat keamanan waspada atau sedang sebanyak 36 permukiman tersebut dapat dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas kemanan yang ada di Kecamatan Depok sudah banyak tersedia namun masih belum optimal dalam penggunaannya, serta daya dukung antar fasilitas dan kegiatan pos ronda yang ada di Kecamatan Depok belum berjalan secara maksimal. Nilai presentase terendah yaitu pada tingkat keamanan tinggi dimana hanya sebanyak 31 permukiman saja yang dapat dipengaruhi oleh fasilitas kemanan serta kesadaran masyarakat Kecamatan Depok akan keamanan pencurian sudah mulai tinggi sehingga tingkat pencurian yang tinggi atau rawan pencurian tersebut memiliki presentase terendah dibandingkan dengan yang lain. Namun masih perlu ditingkatkan kembali fasilitas keamanan, serta kesadaran penduduk akan tingkat pencurian yang tinggi dan waspada tersebut agar dapat menurunkan tingkat keamanan waspada dan rawan pencurian menjadi wilayah yang aman akan pencurian. Hal tersebut juga perlu adanya ikut peran serta dari pihak kepolisian untuk

dapat berpatroli di sekitar lingkungan permukiman. Nilai presentase tingkat pencurian yang rendah atau dapat tergolong aman sebanyak 31 permukiman dimana angka tersebut masih terbilang kecil yang seharusnya wilayah Kecamatan Depok diharapkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Kesadaran masyarakat dan ikut peran sertanya dari pihak-pihak terkait dengan keamanan seperti polisi dapat sangat membantu menurunkan tingkat pencurian dari waspada dan rawan menjadi aman. Fasilitas-fasilitas kemanan yang sudah ada juga perlu ditingkatkan kembali dan difungsikan sebagaimana fungsinya agar dapat berjalan sehingga dapat mengurangi tingkat pencurian di Kecamatan Depok. Kerugian yang dialami di Kecamatan Depok juga mempengaruhi tingkat pencurian di Kecamatan Depok. Gambar 2 menyajikan diagram kerugian yang telah dialami oleh masyarakat yang sudah menjadi korban pencurian di Kecamatan Depok.

2. Tingkat Kualitas Permukiman, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Persyaratan aspek kualitas lingkungan permukiman mencakup persyaratan fisik rumah itu sendiri sebagai tempat tinggal dan juga persyaratan fisik sarana dan prasarana penunjang aktivitas bermukim yang ditinjau dari segi kuantitas, kualitas dan juga jangkauan pelayanannya (Kamus Penataan Ruang, 2009). Berdasarkan tujuan kedua yang ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Depok maka akan diteliti dengan menggunakan beberapa variabel menurut APHA, 1980 yang sudah dimodifikasi oleh penulis. Variabel-variabel tersebut yaitu jenis atau tipe bangunan, jenis dinding, jenis bahan pintu, jenis jendela, keberadaan pintu pagar, jenis pagar halaman rumah, ketersediaan garasi, ketersediaan halaman rumah, lebar jalan dan jenis jalan.



Sumber : Data Primer atau Survey (diolah)

Gambar 4.18. Tingkat Kualitas Permukiman Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Tingkat kualitas permukiman yang diukur dari berbagai macam variabel mulai dari kondisi fisik bangunan, kondisi lingkungan dan juga sarana prasarana berupa aksesibilitas permukiman. gambar 4.2 menunjukkan tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Depok, terlihat bahwa permukiman dengan kualitas rendah hanya sebanyak kualitas permukiman sedang sebanyak 58 permukiman, dan kualitas tinggi sebanyak 38 permukiman. Nilai tertinggi di Kecamatan Depok yaitu 58 permukiman menyatakan bahwa kualitas permukiman di Kecamatan Depok memiliki kualitas yang sedang. kualitas tersebut sudah diukur dari beberapa aspek. Semakin baik aspek atau variabel yang digunakan untuk melihat kondisi kualitas permukiman di Kecamatan Depok, maka akan semakin berpengaruh terhadap kualitas permukimannya. Hanya sebanyak 4 permukiman saja yang memiliki kualitas permukiman rendah, sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Depok sudah memperhatikan aspek-aspek atau variabel-variabel yang mendukung suatu kualitas permukiman sehingga tercapainya kualitas permukiman yang baik. Variabel tersebut yaitu tipe bangunan, jenis dinding, jenis bahan pintu, jenis bahan jendela, ketersediaan pintu pagar, jenis pagar halaman rumah, ketersediaan garasi, ketersediaan halaman rumah, lebar jalan dan jenis jalan.

3. Hubungan Tingkat Pencurian dengan Kualitas Pencurian Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Hubungan antara kualitas permukiman dengan tingkat kasus pencurian pada penelitian

ini menggunakan metode analisis korelasi spearman's rho. Metode analisis korelasi spearman's rho termasuk kedalam non parametrik statistik. Hasil uji normalitas yang sudah dilakukan menunjukkan hasil signifikansi kolmogorov-smirnov sebesar 0,253 yang berarti diatas 0,05 sehingga memiliki distribusi data yang normal. Metode analisis korelasi spearman's rho ini digunakan pada skala data ordinal.

Tabel 4.1 Hubungan korelasi antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Correlations				
	KelasTingkatpencurian		KelasTingkatpencurian	Kelaskualitaspemukiman
Spearman's rho	KelasTingkatpencurian	Correlation Coefficient	1,000	-,287
		Sig. (2-tailed)	.	,004
		N	100	100
	Kelaskualitaspemukiman	Correlation Coefficient	-,287	1,000
		Sig. (2-tailed)	,004	.
		N	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer/survey (diolah SPSS)

Tabel 4.1 menyajikan hubungan korelasi yang ada antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman. Menurut Sarwono, 2006 bahwa nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1, dimana memiliki tingkat hubungan diantara dua variabel yaitu :

- 0 =Tidak ada korelasi antara kedua variabel
- 0-0,25 =Korelasi sangat lemah
- 0,25-0,5 =Korelasi cukup
- 0,5-0,75 =Korelasi kuat
- 0,75-0,99 =Korelasi sangat kuat
- 1 =Korelasi sempurna

Berdasarkan hasil tabel uji korelasi tersebut didapatkan nilai koefisien korelasi antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman sebesar -0,287, nilai negatif yang dihasilkan dari koefisien korelasi ini menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman. Nilai koefisien korelasi tersebut jika semakin mendekati -1 maka keterkaitan hubungan berbanding terbalik antara kedua variabel tersebut semakin kuat, sedangkan jika nilai koefisien korelasi tersebut semakin menjauhi -1 maka keterkaitan hubungan berbanding terbalik antara kedua variabel tersebut semakin rendah. Keterkaitan nilai koefisien korelasi yang hanya sebesar -0,287 mempunyai keterkaitan yang cukup diantara

kedua variabel yaitu variabel tingkat pencurian dan variabel kondisi fisik lingkungan. Sehingga dapat diketahui bahwa jika variabel *dependent* tingkat pencurian semakin tinggi maka variabel *independent* kualitas permukiman juga akan semakin rendah, sebaliknya jika tingkat pencurian rendah maka kualitas permukiman akan tinggi dan mempunyai hubungan korelasi yang cukup atau sedang diantara keduanya.

Ho : Tingkat pencurian berkorelasi dengan kualitas permukiman

H₁ : Tingkat pencurian tidak berkorelasi dengan kualitas permukiman

Hasil nilai signifikansi yang diperoleh untuk kondisi fisik bangunan permukiman yaitu sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa Ho diterima karena adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pencurian yaitu *dependent variabel* dengan kualitas permukiman yaitu *independent variabel*. Tingkat korelasi yang memiliki hubungan yang cukup kuat yang bersifat berbanding terbalik tersebut maka dapat di artikan bahwa tingginya tingkat kasus pencurian di Kecamatan Depok karena memiliki kualitas permukiman yang rendah yaitu tidak sesuai dengan pedoman perencanaan hidup sehat (APHA,1980).

Kualitas permukiman tersebut bukan hanya dinilai dari kondisi fisik bangunannya saja, namun juga dinilai dari kondisi lingkungan permukiman seperti kondisi halaman rumah, kondisi aksesibilitas yang terkait dengan jalan dan juga mudahnya akses untuk ditempuh dan juga dari nilai keamanan suatu permukiman yaitu dari pencurian.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa memang adanya keterkaitan yang cukup kuat antara tingkat pencurian dengan kualitas permukiman, yang ditunjukkan dengan suatu permukiman dapat dinyatakan memiliki kualitas yang baik apa bila dirasa aman dari gangguan apapun termasuk pencurian. Semakin tinggi dan baik kualitas permukimannya maka semua aspek atau variabel yang mempengaruhi kualitas permukiman tersebut akan semakin baik pula. Semakin tinggi tingkat pencurian suatu wilayah maka akan smakin tinggi pula variabel yang mempengaruhi tingkat pencurian tersebut. Sehingga untuk mendapatkan tingkat pencurian yang rendah harus adanya keseimbangan antara kondisi keamanan lingkungan permukiman dan

kemanan permukiman tersebut dengan kualitas permukiman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kasus pencurian di Kecamatan Depok memiliki tingkat yang sedang atau bersifat waspada terhadap kasus pencurian. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai tingkat pencurian sebanyak 36 permukiman yang memiliki status waspada. Sehingga perlu adanya peningkatan kembali terhadap kasus pencurian baik dari fasilitas keamanan lingkungan permukiman, kesadaran masyarakat, juga dari pihak pemerintah atau aparat kepolisian dalam mengatasi tingginya kasus pencurian tersebut. Tingkat kasus pencurian yang rendah atau bersifat aman di Kecamatan Depok sebanyak 33 permukiman dan yang tinggi atau rawan sebanyak 31 permukiman.
2. Tingkat kualitas permukiman di Kecamatan Depok memiliki kualitas permukiman yang sedang, yaitu sebanyak 58% permukiman. Kualitas permukiman yang lain yaitu sebanyak 4 permukiman dengan kualitas rendah dan sebanyak 38 permukiman yang sudah memiliki kualitas permukiman yang tinggi atau baik.
3. Terdapat keterkaitan hubungan antara tingkat pencurian terhadap kualitas permukiman dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,287 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang berbanding terbalik yang bersifat cukup yaitu jika tingkat kualitas permukiman tinggi maka tingkat kasus pencurian rendah dan sebaliknya. Nilai signifikansi tingkat pencurian terhadap kualitas permukiman sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diketahui bahwa Ho diterima karena adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pencurian yaitu *dependent variabel* dengan kualitas permukiman yaitu *independent variabel*.

DAFTAR PUSTAKA

- American Public Health Association (APHA). 1980. *Basic Principle of Healthful Housing*. New York
- Anwar, M. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung : Alumni Bandung.
- Budiharjo, Eko (1991). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Departemen Pekerjaan Umum, 1980. *Peraturan tentang agregat halus dan agregat kasar (SII.0052, 1980) dan (ASTM C33.1982)*.
- Departemen Pekerjaan Umum Indonesia. 2009. *Kamus Penataan Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Kurniasih, Sri. 2007. *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara – Jakarta Utara*. Jakarta Selatan : Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur.
- Logman, M. 1998. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : Bina Aksara
- Pemerintah Republik Indonesia (2011), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta.
- Parwata, I Wayan. 2004. *Dinamika Permukiman Perdesaan Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor : Politeria.
- Van der Zee. 1986. *Human Settlement Analysis. Enshede Netherlands: International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC)*
- Wijayanto, Haris. 2014. *Studi Kualitas Permukiman di Ring I Kawasan Pembangunan Industri Semen di Kecamatan Tambakboyo (Skripsi)*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Yunus, Hadi Sabari. 1978. *Konsep Perkembangan dan Pengembangan Daerah Perkotaan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.